

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN
BAGI *DEBT COLLECTOR* DALAM MENARIK KEMBALI
KENDARAAN SEPEDA MOTOR**

(Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**TIA SEPTIANA
NPM : 1621030292**

Program Studi : Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)

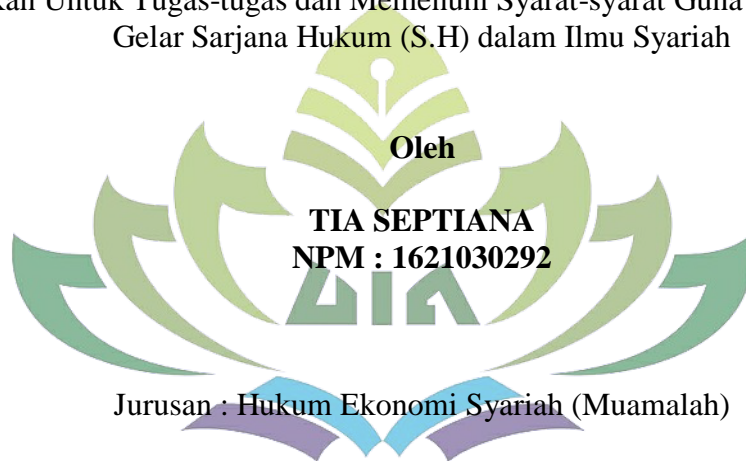


**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN
BAGI *DEBT COLLECTOR* DALAM MENARIK KEMBALI
KENDARAAN SEPEDA MOTOR**
(Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M
Pembimbing II : Dr Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441H / 2020**

ABSTRAK

Upah merupakan imbalan terhadap jasa pekerja yang diberikan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Biasanya pengusaha melakukan pengupahan berdasarkan kebijakan yang dilakukan dari usaha-usaha tersebut. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan bagi *debt collector* dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem pengupahan *debt collector* dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengupahan *debt collector* dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem pengupahan bagi *debt collector* dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya.

Jenis penelitian ini merupakan *Field research* dengan studi yang dilakukan di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari *debt collector* dan Karyawan Adira serta sumber data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh dari catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Metode analisis data adalah kualitatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 1 orang kepala cabang Adira, 1 orang Karyawan Adira (ARH) dan 2 *debt collector*. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini sistem pengupahan bagi *Debt Collector* dalam menarik kembali kendaran sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya yaitu apabila nasabah membayar uang tunggakan kredit sepeda motor, maka *debt collector* akan diberi upah sebesar 10% dari uang yang dibayar oleh nasabah, dan apabila *debt collector* menarik kembali kendaraan sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo maka *debt collector* akan diberi upah sesuai jenis, keadaan serta tahun dikeluarkannya sepeda motor tersebut dan Pandangan dalam hukum Islam terhadap upah yang diperoleh oleh *debt collector* dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya belum sesuai dengan hukum Islam khususnya berkenaan dengan rasa keadilan karena upah yang diterima tidak sebanding dengan resiko pekerjaan



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
SISTEM PENGUPAHAN BAGI DEBT
COLLECTOR DALAM MENARIK
KEMBALI KENDARAAN SEPEDA
MOTOR (STUDI PADA PT. ADIRA
DINAMIKA MULTI FINANCE, BANDAR
JAYA)**

Nama : **Tia Septiana**
NPM : **1621030292**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M
NIP. 19570305197831001

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H
NIP. 1971120419970320001

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG SISTEM PENGUPAHAN BAGI DEBT
COLLECTOR DALAM MENARIK KEMBALI
KENDARAAN SEPEDA MOTOR (STUDI PADA PT.
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, BANDAR
JAYA)"** disusun oleh, **Tia Septiana, NPM. 1621030292**,
program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, telah
diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN
Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 17 Februari
2020**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. H. Khiorul Abror, M.H.**

Sekretaris : **Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

Penguji Utama : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

Penguji I : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

Penguji II : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.**



MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari' Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda,

“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”

(HR. Ibn Majah).¹



¹ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No.2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009), h.816.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atau hidayah-Nya, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

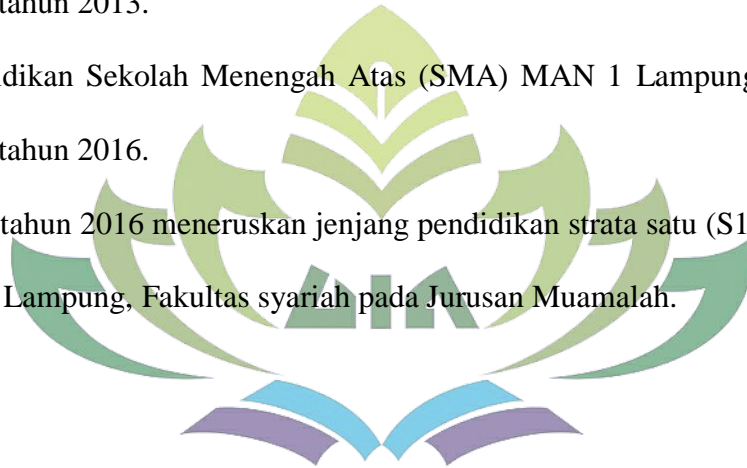
1. Kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Toni Efendi (Alm) dan Ibunda Nurbaiti yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku. Tiada kata yang aku haturkan permohonan maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik kepada Ayahanda tercinta.
2. Kakak ku tersayang Citra Dewi Anggraini, yang selalu mendukung dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk nenek ku tersayang Siti Kasiah terima kasih telah memotivasi, menemani dan selalu mendoakan. Serta saudara-saudara yang selalu senantiasa memberikan semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Tia Septiana dilahirkan di Fajar Bulan pada tanggal 2 September 1998, anak kedua dari dua bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Bapak Toni Efendi dan Ibu Nurbaiti.

Menempuh pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Dasar (SD) SDN 1 Fajar Bulan, lulus pada tahun 2010.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN 1 Gunung Sugih, lulus pada tahun 2013.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN 1 Lampung Tengah, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 meneruskan jenjang pendidikan strata satu (S1) di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas syariah pada Jurusan Muamalah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bagi *Debt Collector* Dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor. Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dijumpai kebenarannya maka itulah yang ditujukan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena tidak kesengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan terimakasih kepada terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang membangun dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung, sehingga menjadi seperti sekarang ini.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M., selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusun skripsi ini.
5. Tim Penguji skripsi Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku ketua sidang, Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag selaku sekretaris, Bapak Relit Nur

Edi, S.Ag., M.Kom.I selaku penguji I, Bapak Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M selaku penguji II, dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H selaku penguji III.

6. Seluruh Dosen Asisten dan Dosen pegawai Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Orang tua saya, kakak, dan sahabat-sahabat terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 UIN Raden Intan Lampung, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Teman-teman KKN UIN Raden Intan Lampung Kelompok 40 yang tidak disebutkan satu persatu. Terimakasih atas persahabatan selama ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan lampung.

Bandar Lampung, 8 Desember 2019

Penulis,

Tia Septiana

NPM 1621030292

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah (<i>IJARAH</i>) dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	15
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	21
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	27
4. Macam-Macam Upah (<i>Ijarah</i>)	31
5. Hukum Upah- mengupah (<i>Ijarah</i>) Atas Pekerjaan	32
6. Sistem Pengupahan Dalam Islam.....	33
B. Konsep upah dalam Hukum Positif.....	38
1. Pengertian Upah	38
2. Bentuk dan Jenis Upah.....	42
3. Dasar Penetapan Upah	43
4. Sistem Pembayaran Upah	45
C. <i>Debt Collector</i> dalam Sistem Penagihan Hutang.....	50
1. Pengertian <i>Debt Collector</i>	52
2. Dasar Hukum <i>Debt Colector</i>	52
3. Kewajiban <i>Debt Collector</i>	53
4. Hak <i>Debt Collector</i>	54
5. Larangan <i>Debt Collector</i>	55
6. Akad perjanjian kerja	56

7. Syarat-Syarat <i>Debt Collector</i>	63
D. Menarik Kembali.....	63
1. Pengertian Menarik Kembali	63
2. Larangan Menarik Kembali	64
E. Tinjauan Pustaka	67

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian	70
1. Sejarah berdirinya PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya	70
2. Wilayah PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya ...	73
3. Struktur Organisasi PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya	74
B. Sistem Pengupahan Yang diberikan PT. Adira Dinamika Multi Finance	80

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Pengupahan bagi <i>Debt Collector</i> dalam Menarik kembali Kendaraan Sepeda Motor yang diberikan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya	88
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang sistem pengupahan bagi <i>Debt Collector</i> dalam Menarik Kembali Kendaraan sepeda motor Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bimbingan Konsultasi
2. Surat Keterangan Observasi
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Surat Riset
5. Surat Keterangan Adira



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bagi *Debt Collector* Dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor (Studi PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya).”** Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli Hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.² Hukum Islam disini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur tentang keadaan antar manusia yakni Fiqh Muamalah. Hukum Islam pula dinamakan fikih, yang berarti

¹Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² M. Hasbi Assidiqy, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Riski, 2002), h. 41.

pemahaman dan penalaran rasional.³ Dari uraian-uraian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam adalah yang mengatur keadaan antara hubungan manusia dengan manusia.

Upah (*Ijarah*) adalah imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi) Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati⁴

Menarik Kembali adalah Menurut KBBI adalah mencabut, membatalkan, mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah melanggar suatu perjanjian dalam akad.⁵

Debt Collector adalah seorang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka yaitu, pihak ketigayang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit.⁶

Kendaraan Sepeda Motor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.3.

⁴ Syaifullah Aziz, *Fiqih Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 377.

⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1530.

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti), h. 61-62.

Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul Proposal ini adalah untuk meninjau Sistem Pengupahan Bagi *DebtCollector* dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor (Studi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya)

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan memilih Judul skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang kerja didalam kehidupan masyarakat.
- b. Mengingat sangat banyak kebutuhan manusia sekarang ini yang berkembang pesat makabanyak pula persoalan yang terjadi didalam muamalah sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifiknya menyerahkan Upah Mengupah dalam Jasa yang diberikan oleh orang.

2. Alasan Subjektif.

- a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Referensi yang terkait didalam penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan dengan Allah Swt maupun hubungan kepada manusia. Hubungan manusia sesama manusia biasa disebut dengan Muamalah. Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain. Contohnya, Hukum Islam yang termasuk Upah-mengupah. Salah satu bentuk pengembangan kualitas kerja adalah upah.⁷

Banyak kejadian yang harus Umat Islam perhatikan terhadap kehidupan dalam bermasyarakat tempat dimana mereka tinggal. Dimana kebutuhan kehidupan sehari-hari harus tercukupi agar terciptanya kehidupan yg layak dan sejahtera.⁸

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja.⁹

Debt Collector sebagai pihak yang dikuasakan oleh perusahaan untuk menarik kembali kendaraan Sepeda Motor kepada Nasabah yang dianggap lalai dalam melakukan perjanjian dengan kreditur. *Debt Collector* disini merupakan badan usaha yang berkerja sama dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya, jika terjadi masalah penunggakan dalam pembayaran kredit

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 2

⁸ Srijanti dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 210.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 403.

sepeda motor yang sudah jatuh tempo dan sudah masuk ke dalam daftar buku penarikan unit di Adira maka tugas dari *Debt Collector* ini untuk menarik kembali kendaraan tersebut.

Seorang Nasabah yang belum mampu membayar cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur dengan alasan Wanprestasi. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *Debt Collector* untuk menyita barang tersebut jika tidak berhasil menagih biaya kredit. Suatu hubungan antara Nasabah dan kreditur umumnya diawali dengan perjanjian. Jika nasabah Wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada nasabah.

Upah bagi *Debt Collector* tersendiri yaitu tergantung hasil kerjanya dalam menagih nasabah sehingga tidak menentu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, debt collector di beri upah 10% apabila nasabah membayar tunggakan sepeda motor dan apabila *debt collector* dapat menarik sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo dan sudah masuk ke dalam buku penarikan Adira maka *debt collector* akan diberi upah sesuai jenis motor, keadaan motor dan tahun dikeluarkannya motor. karena *Debt Collector* tidak memiliki gaji pokok, melainkan mendapatkan upah apabila ia dapat menagih nasabah atau

menarik kembali kendaraan yang di kredit oleh debitur di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya.

Dalam hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering.

Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْإِجْرَ جَيْرًا جَرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari 'Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).¹⁰

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu.

Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (Faidhul Qodir, 1: 718)¹¹

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan apabila hukum dalam memberikan upah kepada pekerja itu wajib setelah ia selesai menjalankan pekerjaannya.

¹⁰ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No.2443 (Dar Ihya'al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), h.816.

¹¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41

Akad antara *Debt Collector* dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya menggunakan akad secara tertulis diawal perjanjian. Yang mana di sepakati oleh kedua belah pihak dengan sistem pengupahan yang telah ditentukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya.

Masalah yang sering kita jumpai disekitar kita, dari kasus banyaknya pekerja yang tidak pasti dalam menerima upah dari hasil kerjanya, membuat penulis mengangkat permasalahan ini. Hal ini merupakan sesuatu permasalahan yang perlu dikaji, karena upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, sehingga berhak mendapatkan penghasilan yang layak, sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

D. Fokus penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan penentuan Hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengupahan dengan tidak jelas, yaitu tergantung pada hasil yang diperoleh dalam menagih nasabah atau menarik kembali kendaraan yang telah di kredit oleh nasabah. Karena adanya kepentingan dari masalah pada pengupahan, penelitian akan difokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Bagi Debt Collector Dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor (Studi PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengupahan bagi *Debt Collector* dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan bagi *Debt Collector* dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan Proposal
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengupahan bagi *Debt Collector* dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya.
 - b. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan bagi *Debt Collector* dalam Menarik Kembali Kendaraan Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah :

- a. Secara teoritis, peneliti diharapkan mampu memberikan wawasan bagi penulisan dan pemahaman bagi masyarakat tentang upah dalam pandangan Hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlihat dalam pelaksanaan pengupah yang didapatkan oleh pekerja tidak jelas, karena sistem mereka dibayar tergantung hasil yang diperoleh mereka dalam berkerja. Serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai dengan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau padaresponden. Dalam hal ini akan langsung mengamati. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan

literature (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.¹²

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai pemberian upah *Debt Collector* dalam menarik kembali kendaraan sepeda motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya ditinjau dari Hukum Islam.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari *Debt Collector* di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya yang dikumpulkan dari bulan September sampai dengan bulan Oktober Tahun 2019.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

¹²Susiadi AS, *Meteologi Penelitian* (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa beberapa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala RO (Cabang Adira Bandar Jaya), ARH (Account Receivable Head) 1 orang, dan *Debt Collector* 2 orang yang akan peneliti wawancarai tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.¹³ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang maka penelitian ini termasuk penelitian populasi yang mana jumlah seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian.

¹³ *Ibid.* h. 33

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Wawancara(*Interview*)

penelitian ini menghimpun data dengan cara wawancara yaitu *interview* merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁴ Pada saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang peneliti butuhkan seperti mewawancarai Bagaimana Sistem Pengupahan bagi *Debt Collector* dalam Menyita Kendaraan Sepeda Motor yang diberikan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya dan yang penulis wawancarai antara lain *Debt Collector* itu sendiri yang berada di lokasi penelitian.

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamat dan pencatat dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamat yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung,¹⁵ dan yang menjadi bahan observasi adalah tentang Sistem Pengupahan bagi *Debt Collector* itu sendiri.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 95

¹⁵ *Ibid*, h. 135

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan lain sebagainya.¹⁶ Untuk memperoleh data monografi di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya khususnya dalam bidang data-data serta catatan sistem pengupahan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku *Literature*, perundang-undangan, dan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁷

¹⁶Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi II* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202

¹⁷Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 126

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berpikir Deduktif dan Induktif. Metode deduktif yaitu mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berpikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁸ Sedangkan metode induktif yaitu fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹



¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 80

¹⁹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h. 182

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Upah (*IJARAH*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Pengertian upah secara terminologi adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹

Salah satu kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu salah satunya *Ijarah*. Secara etimologi, *Ijarah* adalah berarti “Upah” atau “Ganti” atau “Imbalan”. Upah dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah berkerja dan kewajiban orang yang telah memperkerjakan untuk membayarnya. Upah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberian kerja wajib pembayarannya.²

Sedangkan upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadu* (ganti). Oleh karena itu, *tawab* (pahala) disebut dengan *al-ajru* atau upah.³

¹ H.A.Khumi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 141

² M.Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah”. Jurnal Al-Adalah, vol 14 No 2 2017, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), h. 484. (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/Indekx.php/adalah/article/view/1909> (3 September 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

Kata *Ijarah* berarti “balasan” atau “jasa”, artinya imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan. Menurut syara’: “*Ijarah*” adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia.⁴

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu’ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta’jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta’jir* oleh seorang *mu’ajir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompetensi tertentu pula.⁵

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayar kepada pekerja atau jasanya dalam bidang produksi atau *factor* produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadaan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-

⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 422.

⁵ Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 81.

kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. karena yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hal dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gaharar* (ketidak pastian atau penipuan), *Maysir* (Pejudian), *Riba* (Bunga Bank), *Zhulm* (Penganiyaan), *Risywah* (Suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan disebut dengan akad. Dengan akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipehuni tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan sosial. Kenyataan ini menunjukan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁶

⁶ Hendri Sehendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114.

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undang dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun *ijarah* kadang-kadang akad *Ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.⁷

Upah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah dapat dikatakan tujuan utama

⁷ M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006), h. 180

dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah adalah imbalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan.⁸ Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan terakhir pada hubungan kerja putus.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *Al-Ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama Fiqih:

⁸ UU Republik No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 15.

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “*Ijarah* yaitu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”.¹⁰
- b. Para Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “*Ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas).
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- d. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengantian yang jelas pula.

Definisi *Ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama sebelumnya yang intinya adalah transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *Ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua’jir* oleh seorang *musta’jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah).

¹⁰ Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al- Arba’ah* Jilid 3, (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), h. 94.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

a. Sumber Hukum Al-Qur'an

Al-Quran secara Hanifiyah berarti bacaan adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampir semua ulama fiqih bersepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan(adat).

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Q.S Al- Qashash ayat 27 disebutkan

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
 حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): “Berkatakan dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu seseorang dan kedua anakku ini,atas dasar bahwa Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak cukupkan sepuluh

tahun kamu, dan kamu insya allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S Al- Qashash (28):27).¹¹

Q.S Al-Baqarah ayat 233 disebutkan

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah ;233)”.¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban.

¹¹ Prof H. Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT: Alma'arif, 1989), h. 352

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 29.

Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang di rugikan.

Al-Qur'an surat An-nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ; 97).¹³

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia dan diakhirat.¹⁴

¹³ *ibid*, h. 222

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 29.

Surat Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf ; 32).¹⁵

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini di artikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantaranya kalian saling membutuhkan satu sama lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ijarah* atau upah-mengupah.¹⁶

Surat Al-Qashash Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang

¹⁵ *ibid*, h. 392.

¹⁶ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 154.

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash: 26).¹⁷

Ayat-Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as Bertemu dengan Putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa di angkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu di lakukan.¹⁸

b. Hadist

Hadist adalah perkataan (sabda), perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber hukum islam selain Al-Qur'an. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Selain itu ayat Al-Qur'an diatas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

¹⁷ Ibid, h. 310.

¹⁸ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*...., h. 156.

Dari 'Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).¹⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَاعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).²⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلَنَا هُ الْمُذَارَعَةَ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُزَارَعَةٍ وَأَمَرَ بِأَمْوَالِ الْمُزَارَعَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)

dari Abdullah bin Sa'ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin ma'qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzaraah? Maka jawabnya: Tsabit menhyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim).²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالِقِيَا مَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ فِي ثَمٍّ غَدَرٍ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَا سَتَوَفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

¹⁹ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Op., Cit.*, h.816.

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

²¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008), h.637.

Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabdah: Allah ta'ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".(HR. Bukhari).²²

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Akad Upah (*Ijarah*)

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *Ijab* dan *Qabul* saja mereka mengakui tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan adapun sewa menyewa adalah *Ijab* dan *Qabul*, sebab seperti apa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.²³

Jadi menurut Hanafiyah rukun sewa yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan orang yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu,

²² Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h.531.

²³ Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), h. 53.

di syariatkan pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.²⁴

2) *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. *Shighat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad juga dapat diubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

3) *Ujrah*, pemberian upah yang di paparkan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

4) *Ma'jur* (manfaat) baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *Ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *Ijarah*, apabila penggunaan *Ma'jur* tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.²⁵

b. Syarat Sahnya Upah (*Ijarah*)

Ulama menganjurkan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat pada akad *Ujrah* berkaitan dengan “*Aqid* (pelaku) dan *Ma'qud'Alaih* (objek), di antara kedua belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah akad *Ujrah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:.

1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang terpaksa melakukan

²⁴ *ibid.*

²⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*...., h. 125.

akad, maka akadnya tidak sah.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam

Q.S. An-Nisa': 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Allah hendak menerangkan (hukum syari’at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para Nabi dan Shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa’: 29)²⁷

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabillah, diisyaratkan telah baligh dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *Mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *Mumayyiz* melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila di setujui walinya.²⁸

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232

²⁷ Dapertemen Agama RI,...., h. 65.

²⁸ Ahmad Wardani M, *Fiqih Muamalat*. Ed. 1. Cet, 1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

- 2) Objek *Ujrah* itu adalah suatu yang di halalkan oleh syara', ini berarti agama tidak memperoleh mengupah seseorang untuk disuruh melakukan sesuatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang.²⁹

Penjelasan objek kerja dalam penyewaa tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidak jelasan. Hal ini karena ketidak jelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Dan jika ada orang yang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akad itu tidak sah.

- 3) Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.³⁰

- 4) Upah/sewa dalam akad *Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang haruas diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.³¹

²⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah....*, h. 232.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, (damaskus, Dar al-Fikr, 1989), h. 401.

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah....*, h. 157.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja untuk itu tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang di janjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena ia di sewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang telah di janjikan.

Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *Ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat menghantarkan kepada riba.

- 5) Waktu kerja, dalam akad *Ijarah* harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atas selsainya pekerjaan tertentu, selain harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.³²

4. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Di lihat dari segi objeknya Upah atau *Ijarah* dapat diklarifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah di sebutkan (*ajrun musamma*), yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

³² Nur Huda et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis....*, h. 230.

- b. Upah yang sepadan (*ajrun misli*), yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja), jika *Ijarah* kerjanya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaannya.

Orang yang menentukan upah tersebut (*ajrun misli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubarau*.³³

5. Hukum Upah- mengupah (*Ijarah*) Atas Pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkat barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu :

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya, seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di salam memanfaatkan

³³ M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), h. 67.

tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarik*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarik*) tidak berhak atas upah kecuali ia bekerja.

6. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar Upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dengan firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan, dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, bijaksana, dan dermawan kepada pekerjanya.

Menurut Abu Hanafiah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan

Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.³⁴ Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut;³⁵

- a. Pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. mempercepat pembayaran sewa atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas nampak bahwa pembahasan *Ijarah* lebih banyak bertumpuk pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahsan fiqih muamalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak), kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sistem *Ujrah*.

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya saja dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah.kalau dalam akad diatas, masalah penundaan gaji

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 121.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 210.

adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan semulanya. Penundaan gaji secara sewenang-wenang kepada pekerjaan dilarang dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.³⁶

Ini juga sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa “pada dasarnya itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”

Tidak menutup kemungkinan jika majikan tidak memiliki mata uang nominal, maka pembayarannya gaji pekerja dengan benda (asal pekerja mau menerimanya) dapat dilakukan, asal benda tersebut memiliki nilai standar pasar yang memiliki sifat mubah dan jelas manfaatnya. Pembayaran upah atau gaji dalam bentuk harus diikuti dengan taksiran yang sama dengan jumlah gaji atau upah dalam nilai mata uang nominal.

penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*...., h. 209.

upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.³⁷

Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakar, setelah dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang. Umar Al-Khatib bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah.

Pandangan Al-Maliki yang mendasarkan gaji pada jasa atau manfaat, menimbulkan beberapa implikasi, antara lain:

- 1) Penentuan upah tidak boleh dikaitkan dengan harga-harga barang yang dihasilkan pekerja.
- 2) Tidak diperbolehkan membangun transaksi *Ijarah* berdasarkan transaksi jual-beli, karena akan berakibat pada penentuan harga. Harga kebutuhan didasarkan pada upah seorang *ajir*.
- 3) Mengaitkan antara kesejahteraan seorang *ajir* dengan hasil kerjanya, tidak diperbolehkan.

³⁷ M.I. Yusanto dan M.k. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*...., h. 194.

- 4) Tidak boleh menentukan upah berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat tertentu.

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, “Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *ajir* dan *musta'jir*. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*Al-Ajru al-Musamma*), maka keduanya telah terikat dengan upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya telah terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga kerja tersebut (*Al-Ajru al-Mitsl*). Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan. Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya telah selesai, maka ia mulai lagi ketentuan baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan ketentuan upah. Menentukan upah sepenuhnya pada mekanisme pasar tenaga kerja, tanpa ada control sangat berbahaya. Benar Ibn Taimiyah menawarkan gagasan upah yang setara (*Al-Ajru al-Mitsl*) dengan memperlakukan tenaga kerja sama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi pada zaman itu peranan lembaga *Hisbah* sangat kuat, sehingga saat terjadi kedzaliman antara *ajir* dan *musta'jir*, lembaga *Hisbah* turun tangan

mentapkan upah setara. Cara lain yang mungkin digunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Bani Sadr, sebagai berikut:

- a) Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, dan anak-anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan seniortasnya.
- b) Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia member sumbangan terhadap produksi itu sendiri.

Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan *ajrul al-musamma* berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika transaksi dilaksanakan, dan atau *ajrul al-mitsl* yang tunduk pada penetapan ahli dasar pasar tenaga kerja.³⁸

B. Konsep Upah Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Upah

Upah menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

³⁸ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003), h. 40.

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30)”.³⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Perlindungan Upah No. 8 tahun 1981 pasal 1 “Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari Perusahaan kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya dalam mencukupi kehidupan yang layak.”⁴⁰

Agar dapat memahami apa itu upah, pengupahan maka harus dipahami juga istilah-istilah yang berkaitan dibawah ini.

- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

³⁹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003), h. 5

⁴⁰ Peraturan Pemerintah NO 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah pasal 1 a.

- d. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- e. Pengusaha, pengusaha adalah :
- 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- f. Perusahaan adalah :
- a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik untuk swasta maupun untuk Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b) Usaha –usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- g. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

- h. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah.
- i. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- j. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁴¹

Istilah-istilah diatas sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 dalam buku himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan dan penjelasannya disertai peraturan yang terkait.⁴²

Dengan adanya istilah buruh yang merupakan istilah teknis saja yang kemudian berkembang menjadi istilah pekerja karena lebih sesuai dengan nilai dalam kaidah ketenagakerjaan yaitu falsafah bangsa Indonesia yaitu

⁴¹ Iman Sjah Putra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Harvindo, 2013), h. 50-54.

⁴² Edisi Revisi Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan, UU Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 dan Penjelasannya disertai peraturan yang terkait, Pustaka mahardika, h. 2.

Pancasila, dimana nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila ingin diterapkan dalam tata nilai hukum nasional sebagai perubahan tata nilai hukum warisan Hindia Belanda yang masih berlaku dalam hukum positif Indonesia.⁴³

2. Bentuk dan Jenis Upah

Menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, jenis upah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Mengenai jenis-jenis upah dijelaskan pula dalam dasar-dasar perburuhan yang meliputi:

- a. Upah Nominal, adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang berhak secara tunai sebagai imbalan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah nyata (*Real Wages*), adalah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang pekerja/karyawan yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:
 1. Besar kecil jumlah uang yang diterima,
 2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang akan diperlukan.
- c. Upah Hidup, adalah upah yang diterima pekerja/karyawan relative cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.

⁴³ Ketut Markeling dan Nyoman Mudana, *bahan ajar Hukum Ketatanegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Udayan, Denpasar, 2009, h. 3.

- d. Upah Minimum, adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/karyawan yang bekerja di perusahaannya.
- e. Upah wajar (*Fair Wages*), adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/karyawan sebagai imbalan jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar sering dipengaruhi oleh:
 1. Kondisi Negara pada umumnya,
 2. Nilai upah rata di daerah mana perusahaan itu berada,
 3. Peraturan perpajakan, standar hidup para buruh itu sendiri,
 4. Undang-undang mengenai upah khususnya,
 5. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

Bila dipandang dari sudut nilainya, upah dibedakan menjadi upah nominal yaitu jumlah yang berupa uang dan riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.⁴⁴

3. Dasar Penetapan Upah

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuhan.⁴⁵ Ada kemungkinan bahwa dalam perjanjian atau peraturan tidak terdapat ketentuan mengenai upah itu. Dalam hal demikian itu, pekerja berhak atas upah yang biasa pada waktunya.

⁴⁴ Imam Soepemo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Ikrarabadi, 1992), h. 130-131.

⁴⁵ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Djambatan: Karya Unipres, 1975), h. 98.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya adalah terletak pada ukuran apa yang akan digunakan dalam membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dunia kerja.

Dalam penetapan upah seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas pada pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya.⁴⁶ Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.

Teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar penetapan upah adalah:⁴⁷

⁴⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 296.

⁴⁷ Zainal Asikin, dkk., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89.

a. Teori upah normal, oleh David Ricardo

Upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk mengkongkosi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan.

b. Teori undang-undang Upah Besi, oleh Lessale

menurut teori ini upah normal di atas hanya memenangkan majikan atau pengusaha saja, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja pengusaha itu mengatakan “Cuma itu kemampuan tanpa berpikir bagaimana susahny buruh itu.” Oleh karena itu, menurut teori ini buruh harus berusaha menentangnya (menurut teori upah itu) agar ia dapat mencapai kesejahteraan hidup.

4. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dalam sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia beberapa cara, diantaranya:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
- b. sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.

- c. sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
- d. sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan diberikan di antara mereka sendiri.
- e. sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh/karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
- f. sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- g. sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.⁴⁸

Dalam hal ini pembayaran upah, pengusaha dan karyawan/buruh dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara, dan tempat pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu

⁴⁸ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), h. 84-87

minggu. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 dengan pengertian upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan/atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

Sistem pelaksanaan pemberian gaji (upah) juga dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok yaitu:

- a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian gaji yang hanya akan dibayarkan jika karyawan telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.
- c. Sistem upah borongan, yaitu selama pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas sesuatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.⁴⁹

Pembayaran upah juga ditinjau dari beberapa hal yaitu:⁵⁰

- 1) Dari segi individu: merupakan gerak dari pada bahan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah.
- 2) Dari segi sosial: melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.
- 3) Dari segi spiritual: merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memulihkan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁹ M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet, ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1991), h. 123.

⁵⁰ Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*...., h. 86

Pelaksanaan pengupah dalam hukum positif juga tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik karyawan maupun pengusaha. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut:

1. Hak Karyawan

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵¹
- b. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan kesempatan kerja
 - 2) Moral dan kesusilaan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵²
 - 4) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.⁵³
 - 5) Hak yang paling utama bagi karyawan adalah pemenuhan upah sesuai dengan yang dijanjikan.
 - 6) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja

2. Kewajiban Karyawan

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan
- b. Menunaikan janji, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.

⁵¹ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, h. 20.

⁵² Pasal 86 ayat (1)

⁵³ Pasal 6 ayat (1)

- c. Perhitungan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan.

Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen-komponen upah tersendiri terdiri dari:⁵⁴

- 1) Upah pokok: imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- 2) Tunjangan tetap: suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan ke tunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.
- 3) Tunjangan tidak tetap: suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak dibayarkan bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.

Sedangkan yang bukan termasuk komponen upah, diantaranya:⁵⁵

⁵⁴ Djumaidji, F.X., *Perjanjian kerja*, cet, ke-4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 39-

⁵⁵ *Ibid.*

- a) Fasilitas: kenikmatan dalam bentuk nyata/atau tidak karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas ibadah.
- b) Bonus: pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas.
- c) Tunjangan Hari Raya (THR), gratifikasi, dan pembagian keuangan lainnya.

C. *Debt Collector* dalam Sistem Penagihan Hutang

1. Pengertian *Debt Collector*

Debt Collector adalah seorang yang menjual jasa untuk menagih hutang seorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka, yaitu pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit⁵⁶

Kualitas penjualan dapat dikatakan baik apabila penjualan tersebut dapat menghasilkan dana kembali dari penagihan. Penjualan yang tinggi tidak akan ada arti apa-apa apabila pada akhirnya tidak bisa dikumpulkan. Sehingga pada saat ini banyak perusahaan mulai menaruh perhatian besar terhadap penerimaan dan penagihan. Fungsi penjualan tidak dapat berdiri sendiri dengan hanya ingin mencapai target penjualan saja.

⁵⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: PT. Citra aditya Bakti, 2008), h. 61-62.

Perusahaan harus dapat menyeimbangkan antara target penjualan dan *collectibility* dari *client*. Artinya perusahaan harus dapat menganalisa calon dan existing customer/klien. Ada customer yang mampu membayar tetapi tidak mau membayar (*bad character*). Pengelolaan piutang dan penagihan (*collection*) bila dilakukan secara profesional akan membantu

Lokakarya ini dirancang secara khusus untuk membekali Anda dengan konsep dan metode dalam menganalisa customer (analisa kredit), pengelolaan piutang beserta sistem yang efektif dalam penagihannya sebagai bagian dari penataan arus kas di perusahaan perbankan.⁵⁷

Istilah *debt collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa *debt collector* merupakan hal yang biasa dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih utang nasabahnya.⁵⁸

Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan

⁵⁷ <http://www.berprosesseminar.com>. Di akses 10 mei-2019

⁵⁸ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2010), h. 12.

menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga pembiayaan ini dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank.⁵⁹

2. Dasar Hukum Debt Collector

a. Dasar Hukum Al-Qur'an (QS. Al-baqarah 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ^{٥٩}
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^{٦٠} وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ^{٦١} فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^{٦٢} فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^{٦٣} وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ^{٦٤} فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^{٦٥} وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^{٦٦} وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ^{٦٧} ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^{٦٨} إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا^{٦٩} وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{٧٠} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{٧١} وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{٧٢} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{٧٣} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{٧٤} اللَّهُ وَبِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

⁵⁹M. Fuady, el. Al. *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

3. Kewajiban *Debt Collector*

Secara umum kewajiban *Debt Collector* yaitu setiap *Collector* memiliki kewajiban untuk mentaati, menjunjung tinggi tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan kerja serta penagihan terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemberi/tugas.

Secara Khusus kewajiban *Debt Collector* sebagai berikut;

- a. Menjaga nama baik dan citra perusahaan pemberi kerja/tugas
- b. Mentaati seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku dari perusahaan pemberi kerja/tugas

- c. Mentaati seluruh Undang-Undang dan Hukum yang berlaku baik lingkup Nasional maupun Daerah
- d. Wajib memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah
- e. Bersikap hormat dan tidak menunjukkan sikap elegan karena kewenangan
- f. Melaporkan mengenai perkembangan pelaksanaan tugasnya
- g. Senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra perusahaan, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa; bertutur kata kasar dan bernada kemarahan, menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur kerja, merendahkan harkat dan martabat manusia.
- h. Wajib menyerahkan barang jaminan secara utuh/lengkap yang berhasil diserahkan terimakan maksimal 1x24 jam
- i. Atas penyerahan barang jaminan yang berhasil diserahterimakan maka harus ditandatangani berita
- j. Acara serah terima kendaraan Bermotor (“BASTKB”) sebagaimana dilampirkan pada perjanjian
- k. Harus mendapat persetujuan dari pemberi kerja/tugas apabila Debitur yang menunggak mengajukan penawaran/negosiasi.⁶⁰

4. Hak *Debt Collector*

Hak *Collector* secara umum;

- a. Setiap *Collector* berhak mendapatkan perlindungan Hukum dan pemberi kerja/tugas

⁶⁰ Komaruddin, “Sejahtera Mitra Solusi” Modul Sertifikasi Profesi Bidang Penagihan, Oktober 2019, h. 14-15.

- b. Setiap *collector* berhak atas upah dan atau jasa atas tugas dan kewajiban yang sudah dilaksanakan terhadap pemberi kerja/tugas melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas kerja yang standar
- c. Setiap *Collector* memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelatihan kerja dan peningkatan mutu kerja serta kesejahteraan dari pemberi kerja/tugas

Hak *Collector* secara Khusus, yaitu setiap *Collector* berhak mendapatkan surat tugas/kuasa atas kewajibannya yang akan dijalankannya.⁶¹

5. Larangan *Debt Collector*

Dalam melakukan menagih kartu hutang rangka cara melunasi hutang riba dalam islam baik menggunakan tenaga menagih sendiri atau tenaga menagih dari perusahaan penyedia jasa menagih, penerbit kartu hutang . wajib memastikan bahwa tenaga menagih mematuhi pokok-pokok etika menagih hutang kartu hutang antara lain:

- a. Menagih dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/ atau tindakan yang bersifat memperlakukan pemegang kartu hutang
- b. Menagih dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan fisik maupun verbal.
- c. Menagih dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu hutang

⁶¹ *Ibid.*

- d. Menagih dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu hutang sesuai dengan hukum menagih hutang dalam islam
- e. Menagih menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
- f. Menagih hanya dapat dilakukan di tempat alamat menagih atau domisili pemegang kartu hutang
- g. Menagih hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu hutang
- h. Menagih diluar tempat dan/atau waktu tersebut diatas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan /atau perjanjian dengan pemegang hartu hutang terlebih dahulu.⁶²

6. Akad perjanjian kerja

Akad antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya dengan *Debt Collector* sebagai mitra untuk penagihan unit kendaraan sepeda motor, bahwasanya para pihak telah menyetujui dan menyepakati untuk membuat, melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerjasama yang di atur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama yang telah tertera dalam pasal-pasal di bawah ini:

Bunyi Pasal 1 Definisi adalah:

- 1) Perjanjian Pembiayaan adalah Perjanjian Bersama dengan penyerahan Hak Milik secara fidusia yang di buat dan di tandatangani oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya dengan Debitur.

⁶²Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik kebijakan Hukum Pidana....*, h. 67.

- 2) Obyek pembiayaan adalah adalah setiap unit berupa kendaraan bermotor, mobil dan/atau motor yang merupakan obyek pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
- 3) Debitur adalah nasabah Pihak pertama yang telah membuat dan menandatangani Perjanjian pembiayaan.
- 4) Surat Kuasa adalah Surat kuasa yang di terbitkan oleh pihak pertama (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya) kepada pihak kedua (*Debt Collector*) untuk melakukan penerimaan dan/atau penguasaan Obyek.

BASTIK adalah Berita acara serah terima kendaraan yang di sediakan oleh pihak pertama yang mana akan digunakan pihak kedua sebagai bukti penyerahan obyek pembiayaan.

Bunyi Pasal 2 Ruang Lingkup adalah:

1. Pihak pertama memberikan tugas kerja kepada pihak kedua untuk melakukan kegiatan penerimaan dan/atau penguasaan obyek pembiayaan dari debitur dan/atau pihak lain dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
2. Pihak kedua melaksanakan tugas tersebut diatas harus memiliki dokumen-dokumen yang akan diberikan pihak pertama yaitu surat kuasa, surat pernyataan, alamat sebitur dan jumlah kewajibannya beserta dokumen lain yang di tentukan pihak pertama yang mana merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Bunyi Pasal 3 Kuasa adalah:

1. Pihak pertama akan menerbitkan surat kuasa kepada pihak kedua yang berlaku 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak pertama yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Apabila jangka waktu surat kuasa tersebut sudah berakhir dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan pihak pertama.

Bunyi Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak pertama berkewajiban menerbitkan surat kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan kegiatan penerimaan dan/atau penguasaan Obyek pembiayaan dari debitur dan/atau pihak lain.
2. Pihak pertama berkewajiban untuk menerbitkan surat kuasa kembali apabila surat kuasa dimaksud telah berakhir dan harus diperpanjang sesuai dengan persetujuan dan/atau penilaian dari pihak pertama.
3. Pihak pertama berhak mencabut setiap saat surat kuasa yang telah diterbitkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pihak pertama.
4. Pihak pertama berhak menentukan dokumen-dokumen pendukung yang diberikan kepada pihak kedua sehubungan telah diterbitkannya surat kuasa yang dimaksud.

Bunyi Pasal 5 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak kedua berkewajiban melaksanakan tugas dan/atau kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ini berdasarkan surat kuasa yang telah diterbitkan pihak Pertama serta tidak melanggar segala peraturan dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pihak kedua bertanggungjawab untuk segala tindakan yang dilakukan oleh para pegawainya dan/atau orang lain yang ditunjuk pihak kedua.

2. Pihak kedua berkewajiban mengembalikkan surat kuasa yang telah diterbitkan pihak pertama kepada pihak pertama apabila surat kuasa tersebut telah berakhir dan/atau unit yang merupakan obyek pembiayaan telah diterima dan/atau dikuasai pihak kedua.
3. Pihak kedua berkewajiban memberikan laporan tertulis dan/atau lisan kepada pihak pertama atas tugas yang telah diberikan setiap 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat kuasa.
4. Pihak kedua berkewajiban menyerahkan kepada pihak pertama BASTIK dan Obyek pembiayaan yang telah diterima dan/atau dikuasai pihak kedua ke tempat yang telah ditentukan pihak pertama.
5. Pihak kedua tidak boleh menyimpan obyek pembiayaan yang telah diterima dan/atau dikuasai pihak kedua dari debitur dan/atau pihak lain.
6. Pihak kedua berhak atas biaya-biaya yang ditentukan pihak pertama atas Obyek pembiayaan yang telah diterima dan/atau dikuasai pihak kedua dari debitur dan/atau pihak lain.

Bunyi Pasal 6 Biaya-biaya

1. Pihak pertama akan melakukan pembayaran kepada pihak kedua apabila pihak kedua telah menyelesaikan tugas yang diberikan pihak pertama sebagai berikut :

- 1) Pihak kedua telah menerima dan/atau menguasai Obyek pembiayaan serta telah menyerahkan Obyek pembiayaan dimaksud ke tempat yang telah ditentukan pihak pertama.
- 2) Pihak kedua telah membuat dan menandatangani BASTIK atas Obyek pembiayaan yang telah diterima dan/atau dikuasai pihak kedua.
- 3) Pihak kedua menyerahkan surat kuasa dimaksud dalam pasal 3 kepada pihak pertama.
2. Pihak pertama akan melakukan pembayaran kepada pihak kedua apabila pihak kedua dalam melakukan penerimaan dan/atau penguasaan obyek pembiayaan ternyata Debitur dan/atau Pihak lain ingin melunasi sekaligus semua kewajibannya kepada pihak pertama dimana Obyek pembiayaan telah diterima/dikuasai oleh pihak kedua.
3. Besarnya biaya pembayaran yang dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 akan ditentukan oleh pihak pertama.
4. Pihak pertama akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pihak kedua yaitu sebagai berikut :

Nama Bank :

No. Rekening :

Atas Nama :

Bunyi Pasal 7 Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku sejak di mulai tanggal 11 April 2014 sampai dengan berakhirnya atau pihak kedua tidak berkerja lagi.

2. Para pihak sepakat bahwa pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dengan cara memberikan pemberitahuan kepada pihak kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini.
3. Sehubungan dengan adanya ketentuan-ketentuan pengakhiran dalam perjanjian ini para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Bunyi Pasal 8 Penyelesaian Sengketa

1. Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini terdapat sengketa atau perselisihan antara para pihak, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri dimana pihak pertama berdomisili.

Bunyi Pasal 9 Lain-lain

1. Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi para pihak.
2. Para pihak menyatakan bahwa masing-masing pihak secara hukum dan peraturan perundangan berhak untuk menandatangani perjanjian ini dan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau perdata.

3. Hal-hal yang tidak tercantum dan di atur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam Addendum secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini serata mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

b. Memahami bahwa dalam melaksanakan semua ketentuan yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama maka wajib menjalankannya sesuai peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada :

- 1) Tidak akan melakukan penganiayaan secara fisik terhadap Debitur atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan debitur (baik hubungan kekerabatan karena perkawinan, pegawai dll) ataupun dengan orang yang menguasai barang jaminan.
- 2) Tidak melakukan pengurusan property atau barang-barang milik debitur.
- 3) Tidak melakukan pemerasan, penculikan dan penyekapan terhadap debitur.
- 4) Tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam terhadap debitur dan/atau pihak yang menguasai barang jaminan.
- 5) Memasuki pekarangan, bangunan dan/atau rumah debitur dan/atau pihak yang menguasai barang jaminan secara tanpa hak.
- 6) Tidak melakukan tindak-tanduk yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia.⁶³

⁶³ Adira Finance, Perjanjian kerjasama jasa pemberian Jasa antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Jaya dengan *Debt Collector*.

7. Syarat-Syarat *Debt Collector*

- a. Menguasai lapangan
- b. Mempunyai kendaraan
- c. Berlaku sopan, jujur serta tanggung jawab atas pekerjaan
- d. Lulus Sertifikasi Propesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)⁶⁴

D. Menarik Kembali

1. Pengertian Menarik Kembali

Menurut KBBI menarik Kembali adalah mencabut, membatalkan, mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada seseorang apabila ia telah melanggar suatu perjanjian dalam akad.⁶⁵

Terkait dengan penarikan kendaraan sepeda motor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki peraturan yang berbeda. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara pendaftaran jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.⁶⁶

Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Istilah “eksekusi” maupun penarikan kendaraan bermotor (*unit*) dalam hal terjadinya

⁶⁴ Komaruddin, wawancara dengan penulis, rekaman kaset, Bandar Jaya, 7 Oktober 2019

⁶⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1530.

⁶⁶ Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (MNC Publishing : Malang, 2015), h. 1.

kemacetan kredit pembayaran angsuran (wanprestasi) oleh debitur dalam praktik di lapangan lebih dikenal dengan istilah “pengamanan” atau “pengambilan kembali” kendaraan bermotor (*unit*).⁶⁷

2. Larangan dalam Menarik Kembali

Debt Collector adalah pihak ketiga yang dipakai oleh lembaga atau perusahaan Leasing untuk menagih hutang Nasabah yang masuk dalam kategori akut. Dengan segala kewenangan, *Debt Collector* berkerja sama dengan leasing berusaha bekerja sama dengan baik melakukan pengejaran atau penagihan hutang terhadap nasabah yang masuk Kotak sesuai target yang ditentukan. Bahkan, dengan beban target yang telah ditetapkan, *Debt Collector* kadang memilih cara tegas dengan menarik kendaraan nasabah yang tidak bisa lagi diajak kompromi, tidak bisa lagi ditoleransi. Dengan keterbatasan pengetahuan, sang nasabah tidak bisa berbuat apa-apa ketika kendaraannya ditarik. Apalagi dia dalam posisi bersalah, dia tidak menyadari apakah sudah betul dengan apa yang dilakukan *Debt Collector*.

Mengenai hal itu, kementerian keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

⁶⁷ Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”. Jurnal Diponegoro Law, vol 6 No. 2 2017, (Universitas Diponegoro : Fakultas Hukum, 2015), h. 2. (online), tersedia di <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> (4 Desember 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 oktober 2012.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit bermotor. Masyarakat sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Pihak Leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Jadi perjanjian fidusia tersebut melindungi asset konsumen, leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan.

Tindakan leasing melalui *Debt Collector* yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindakan pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan dijalan, merupakan tindak pidana perampasan, mereka bisa dijerat pasal 368 ayat (1) KUHP, pasal 365 KUHP Ayat (2), (3) dan (4).⁶⁸

Pasal 368 KUHP ayat (1)

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang

⁶⁸ <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/perusahaan-leasing-dilarang-menarik-paksa-kendaraan-nasabah>. Di akses 23.58-WIB. 13 mei-2019

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

Pasal 365 ayat (2), (3), (4)

(2) Hukuman Penjara selama-lamanya 12 tahun, dijatuhkan

Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ke-2: Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ke-3: Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau paaian jabatan palsu

Ke-4: Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No. 1 dan No. 2.⁶⁹

⁶⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Politea, 1995), h. 98.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Hidayatul Umroh : Analisis Hukum Islam terhadap pemberian upah atas jasa pemeliharaan sapi (studi kasus di dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dilakukan dalam rangka mengambil stars 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di dusun Sambu Kerep sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni pengupahan dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya. Pengupahan tersebut telah ditentukan sebelumnya, dan praktik pengupahan tersebut termasuk dalam kategori bermuamalah dalam bab *Ijarah* yang dalam Hukum Islam adalah mubah (diperbolehkan).

2. Puspita Sari dengan judul : Hukum Islam tentang upah kuli angkut (studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil stars 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian yang dilakukan Puspita ialah tentang hukum upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung.

Sistem pelaksanaan pembayaran upah mengupah terhadap buruh kuli angkut barang yaitu dilakukan antara mu'ajir dan musta'jir dengan cara pembayaran upahnya diberikan pada akhir pekerjaan dengan kesepakatan di awal. Adapun besaran biaya antara Rp. 5000 sampai dengan 15.000 serta dilihat berapa besar dan ringannya barang. Namun dengan demikian ada sebagian kuli yang memaksakan pembayaran diluar kesepakatan yang dibuat.

Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pihak pemilik barang sama-sama sepakat dengan ketentuan yang dibuat. Namun di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung terdapat kuli angkut, yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian.

3. H. Ahmad Nur Shodik dengan judul : tinjauan hukum islam terhadap upah buruh tani di desa Rejosari Kota Banjar Jawa Barat). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dilakukan dalam rangka mengambil stas 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan pengupahan buruh tani yang terjadi di desa Rejosari Kecamatan Rengensari Kota Banjar merupakan pengupahan sebagaimana biasanya, akan tetapi dalam rangka pembayaran upahnya dengan cara ditangguhkan sampai masa panen tiba, dengan cara mendapatkan kesempatan untuk ikut *gacong*/memetik hasil

panen yang kemudian diberikan imbalan upah kerjanya sesuai dengan masa kerja upah yang dilakukan sebelumnya. Pemberian upah seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena didalamnya terdapat akad yang jelas dan pasti dari kedua belah pihak dan memang sudah menjadi adat atau *'urf* bagi masyarakat setempat yang sering dilakukan.



1. Kepada Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai insentif sesuai dengan hasil kerja *debt collector* agar dapat meningkatkan kinerja *debt collector*, salah satunya dengan pemberian uang Transportasi untuk kegiatan operasional *debt collector* yang akan melakukan penagihan kepada nasabah.
2. Kepada perusahaan diharapkan memperhatikan insentif, pelatihan lingkungan kerja dengan baik dan disiplin, terutama pelatihan dalam upaya peningkatan kinerja *debt collector* agar dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan.sistem pengupahan yang di berikan kepada *debt collector*.

